

IDENTIFIKASI FISIK ARSITEKTUR KAWASAN
PERMUKIMAN ETNIS TEPI SUNGAI MUSI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN ASPEK PERATURAN

oleh : **Dr.Purnama Salura, Ir., MT., Dr.Rumiati R Tobing, Ir.,MT., Alfred S**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Universitas Katolik Parahyangan
Bandung November 2014



I. Abstrak

Wujud arsitektur permukiman di tepi sungai merupakan representasi nilai-nilai perilaku masyarakat yang tinggal di tepi sungai dengan berbagai aspek kehidupan yang melatarbelakangi seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah menyebutkan bahwa kebijakan mengenai kawasan permukiman di Indonesia sudah dimulai sejak masa Pra-Kolonial, kemudian berlanjut pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, hingga pada masa Pemerintahan Republik Indonesia. Kebijakan pada masa Pra-Kolonial dan masa Kolonial Belanda lebih menekankan fungsi sungai sebagai kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, kebijakan lebih didasarkan pada fungsi ekologis sungai yang dirumuskan dalam peraturan mengenai garis sempadan sungai. Kebijakan ini menyatakan bahwa seluruh bangunan yang berada di dalam garis sempadan sungai harus ditertibkan agar aktifitas manusia dan fungsi sungai tidak saling terganggu. Dalam kesehariannya, aktifitas masyarakat tepi sungai tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sungai. Secara tidak langsung, kebijakan ini akan menghilangkan tradisi bermukim masyarakat tepi sungai. Padahal tradisi bermukim di tepi sungai ini merupakan salah satu kekhasan yang menjadi identitas lokal masyarakat Indonesia sebagai negara maritim.

Dapat dilihat bahwa aspek politik berperan penting dalam proses penataan lingkungan fisik dan bangunan permukiman di tepi sungai. Manifestasi kekuasaan di dalam arsitektur dapat ditelaah melalui aspek *power*, *program*, *text*, dan *place* seperti yang diungkapkan oleh Kim Dovey. Arsitektur permukiman di tepi sungai juga dapat ditelaah melalui indikator desain *riverfront* yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan kawasan permukiman di tepi sungai.

Kata Kunci : Kebijakan, Arsitektur Tepi sungai, Tata ruang dan bangunan, Permukiman dan perumahan

II. Ruang Lingkup

Fokus Penelitian

Kajian tatanan fisik lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman etnis di tepi Sungai Musi terhadap aspek legal (peraturan pemerintah mengenai Garis Sempadan Sungai) dan aspek tradisi (peraturan masyarakat yang diwariskan turun-temurun).

Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap tatanan fisik lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman tepi Sungai Musi ditinjau dari aspek *power*, *program*, *text*, dan *place* (Kim Dovey) sebagai cerminan konsep pemikiran masyarakat di tepi Sungai Musi.

III. Pendekatan Teoritik

Kekuatan Politik Pemerintahan Dalam Arsitektur

Terbentuknya wujud fisik kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh kegiatan bermukim dengan berbagai aspek sosial yang melatarbelakanginya. Berbagai teori menjadi dasar pemikiran dalam penataan fisik lingkungan dan bangunan di tepi sungai. Tidak terbatas pada teori arsitektural, teori sosial juga berperan untuk menemukan kaitan antara lingkungan binaan dengan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Dalam mengkaji aspek arsitektural kawasan permukiman di tepi sungai diperlukan teori-teori yang berkaitan dengan arsitektur tepi sungai agar dapat diketahui kriteria kawasan tepi sungai tersebut untuk merumuskan indikator desain *riverfront*. Sebagai contoh, indikator desain *riverfront* dapat meliputi fungsi kawasan, pola jalan, struktur ruang, pola masa bangunan, hubungan air dan darat, arah orientasi bangunan, fungsi ruang terbuka, pola *skyline* kawasan, dan estetika fasade.

Teori sosial digunakan sebagai pendukung teori arsitektural sebab dalam proses pembentukannya, sebuah lingkungan binaan tidak terlepas dari fenomena sosial yang melatarbelakanginya. Pada makalah ini, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah aspek kekuatan politik dalam konteks sosial.

IV. Analisis Arsitektural

- Kajian mengenai kekuatan politik tidak terlepas dari kekuasaan. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial memiliki nilai-nilai normatif dalam hidupnya. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki hasrat dan keinginan yang belum tentu sama dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia juga hidup berdampingan dengan manusia lainnya membentuk suatu masyarakat yang guyub dengan berbagai nilai-nilai sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah kekuasaan. Kekuasaan dapat memunculkan berbagai struktur sosial masyarakat yang diatur melalui politik sebagai aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat.
- Terciptanya kawasan permukiman di tepi sungai tidak terlepas dari adanya peran kekuasaan untuk mewujudkan tatanan fisik lingkungan dan bangunan. Dalam mengkaji kawasan permukiman di tepi sungai, teori arsitektur beserta indikator desain *riverfront* menjadi alat untuk mengelaborasi wujud fisik lingkungan dan bangunan. Melalui empat elemen yang dicetuskan oleh Kim Dovey, hasil elaborasi tersebut dapat ditelaah bagaimana manifestasi kekuasaan di dalam arsitektur.

V. Kesimpulan

Untuk kawasan pemukiman, Kesultanan Palembang mengelompokkannya berdasarkan etnis, status sosial, ekonomi, keagamaan, dan kedudukan dalam pemerintahan. Masyarakat elit dan kerabat kesultanan ditempatkan pada dataran tinggi di daerah ilir. Sedangkan kaum pendatang seperti masyarakat Cina, Arab dan Persia membaaur dengan masyarakat asli Palembang yang kebanyakan berasal dari ras Melayu. Kaum pendatang ini membentuk komunitas masing-masing, tinggal bersama dalam suatu wilayah dan mendirikan kampung di tepi Sungai Musi.

Fungsi dari peraturan adalah untuk mengatasi permasalahan yang umum terjadi di tepi sungai, yaitu munculnya *squatter*/bangunan liar yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan di sekitar sungai. Peraturan yang berlaku merata pada seluruh sungai di Indonesia ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Di satu sisi, kota-kota sungai di Indonesia memiliki *settlement* yang sudah lama berkembang di kawasan tepi sungai sebagai salah satu warisan turun-temurun peradaban leluhur. Di sisi lain, peraturan mengenai garis sempadan sungai menegaskan bahwa di sepanjang tepi sungai harus berupa ruang terbuka yang secara tidak langsung ingin menghilangkan tradisi bermukim di tepi sungai yang sudah eksis.

